

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Surakarta

Kota Surakarta dahulu menjadi pusat kerajaan Surakarta Hadinigrat, sehingga masyarakat penduduk kabupaten di sekitarnya biasa menyebut nagari. Pada jaman kemerdekaan, Kota Solo menjadi pusat dari Karesidenan Surakarta, dan ketika masa pemerintahan Orde Baru, status Kota Surakarta tidak lagi menjadi pusat Karesidenan karena telah dihapus oleh Pemerintah. Pada saat ini sebutan Karesidenan Surakarta tersebut sudah tidak ada lagi dan secara kelembagaan Karesidenan Surakarta telah diganti dengan Badan Koordinator Wilayah dan masih menjadi pusat budaya maupun spiritual bagi masyarakat “Solo Raya” khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya.

Kota Surakarta terletak di wilayah strategis yang memiliki banyak potensi di bidang budaya dan ekonomi terutama perdagangan dan jasa. Potensi wisata di Surakarta meliputi wisata sejarah, seperti Kraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, Museum Radyapustaka, Museum Keris ataupun wisata belanja terutama batik di Pasar Klewer, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, Pusat Grosir Solo dan Beteng Plaza, serta *event-event* wisata yang telah menjadi acara tahunan di kota ini, seperti Solo Batik *Carnival*, Mangkunegaran *Performing Art*, Festival Payung, Sekatenan, Karnaval Wayang dan lain-lain. Di bidang jasa, dengan pertumbuhan hotel di Kota Surakarta mendukung Surakarta menjadi Kota MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibithion*). Kementerian Pariwisata telah

menetapkan 'Solo' sebagai salah satu dari 16 kota di Indonesia menjadi Kota MICE yang siap jual dan pasar utama aktivitas MICE di tanah air. Keberadaan Bandara Adi Sumarmo sangat menunjang destinasi MICE sehingga *event-event* nasional maupun internasional siap diselenggarakan di Kota Surakarta.

2.1.1 Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi

Kota Surakarta (adalah wilayah otonom dengan status Kota di bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan penduduk 563.814 jiwa (2018) dan kepadatan 13.636/km². Kluas 44 km². Kota ini juga merupakan kota terbesar ketiga di pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Sisi timur kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan Solo. Bersama dengan Yogyakarta, Surakarta merupakan pewaris Kesultanan Mataram yang dipecah melalui Perjanjian Giyanti, pada tahun 1755.

Secara umum kota Surakarta merupakan dataran rendah dan berada antara pertemuan kali/sungai-sungai Pepe, Jenes dengan Bengawan Solo, yang mempunyai ketinggian ± 92 dari permukaan air laut. Secara geografis wilayah Kota Surakarta berada antara 110°45'15"- 110°45'35" BT dan 7°36'00"- 7°56'00"LS dengan luas wilayah 44,04 Km²

Kota Surakarta merupakan wilayah administratif yang berbatasan dengan daerah penyangga yaitu sebagai berikut batas utara yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, batas selatan yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten

Karanganyar, batas timur yaitu Kabupaten Sukoharjo, batas barat yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

2.1.2 Klimatologi

Menurut klasifikasi iklim Koppen, Surakarta memiliki iklim muson tropis. Sama seperti kota-kota lain di Indonesia, musim hujan di Solo dimulai bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau bulan April hingga September. Rata-rata curah hujan di Solo adalah 2.200 mm, dan bulan paling tinggi curah hujannya adalah Desember, Januari, dan Februari. Suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata 30 derajat Celsius. Suhu udara tertinggi adalah 32,5 derajat Celsius, sedangkan terendah adalah 21,0 derajat Celsius. Rata-rata tekanan udara adalah 1010,9 MBS dengan kelembaban udara 75%. Kecepatan angin 4 Knot dengan arah angin 240 derajat.

2.1.3 Demografi

Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2018 adalah 563.814 jiwa, terdiri dari 278.187 laki-laki dan 285.627 wanita, yang tersebar di lima kecamatan yang meliputi 53 kelurahan dengan daerah seluas 44,1 km² Kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling besar yaitu Kecamatan Banjarsari (14,81 km²) sedangkan kecamatan yang mempunyai luas paling kecil yaitu Kecamatan Serengan. Wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Banjarsari (178.812 jiwa/km²) dan terendah terdapat pada Kecamatan Serengan (53.643 jiwa/km²).

2.1.4 Infrastruktur Kota Surakarta

2.1.4.1 Infrastruktur Sekolah

Tabel 2.1 Infrastruktur Sekolah Negeri

Kecamatan	SD/MI Negeri	SMP/MTS Negeri	SMA/SMK Negeri	Jumlah
Serengan	16	2	2	20
Laweyan	43	7	5	55
Banjarsari	53	9	7	69
PasarKliwon	24	3	1	28
Jebres	40	7	3	50
Jumlah	176	28	18	222

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2017

Infrastruktur sekolah negeri berjumlah 222, dengan jumlah yang terbanyak terdapat Kecamatan Banjarsari 69 sekolah, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Serengan 20 sekolah. Dari jenjang sekolah yang paling banyak yaitu jenjang SD/MI 176 sekolah, sedangkan yang paling sedikit SMA/SMK Negeri 18 sekolah.

Tabel 2.2 Infrastruktur Sekolah Swasta

Kecamatan	SD/MI Swasta	SMP/MTS Swasta	SMA/SMK Swasta	Jumlah
Serengan	12	8	2	22
Laweyan	12	7	22	41
Banjarsari	29	14	25	68
PasarKliwon	23	9	7	39
Jebres	14	11	10	35
Jumlah	90	49	66	205

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2017

Infrastruktur sekolah swasta berjumlah 205, dengan jumlah yang terbanyak terdapat Kecamatan Banjarsari 68 sekolah, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Serengan 22 sekolah. Dari jenjang sekolah yang paling banyak yaitu jenjang SD/MI 90 sekolah, sedangkan yang paling sedikit SMP/MTs Swasta 49 sekolah.

2.1.4.2 Infrastruktur Rumah Sakit

Tabel 2.3 Infrastruktur Rumah Sakit Umum

No	Nama Rumah Sakit	Kepemilikan	Kecamatan
1	RSU Dr Moewardi	Pemprov Jateng	Jebres
2	RS Slamet Riyadi	TNI	Laweyan
3	RS Kasih Ibu	Swasta	Laweyan
4	RS Dr. OEN Surakarta	Swasta	Jebres
5	RS Brayat Minulyo	Swasta	Banjarsari
6	RS Islam Kustati	Swasta	PasarKliwon
7	RS Panti Waluyo	Swasta	Laweyan
8	RSUD Kota Surakarta	Pemkot Surakarta	Banjarsari
9	RS Hermina Surakarta	Swasta	Jebres
10	RS Tri Harsi	Swasta	Banjarsari
11	RS PKU Muhammadiyah Ska	Swasta	Banjarsari

Tabel 2.4 Infrastruktur Rumah Sakit Khusus

No	Nama Rumah Sakit	Kepemilikan	Kecamatan
1	RSJD Surakarta	Pemprov Jateng	Jebres
2	RS Mata Solo	Swasta	Laweyan

3	BBKPM Surakarta	Kemenkes	Laweyan
---	-----------------	----------	---------

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2017

Jumlah infrastruktur rumah sakit yaitu 14 rumah sakit, 11 rumah sakit umum dan 3 rumah sakit khusus dengan kepemilikan yang terbanyak dari swasta 9 rumah sakit sedangkan dari pemerintah 4 rumah sakit. Rumah sakit tersebar di setiap kecamatan di Kota Surakarta kecuali Kecamatan Serengan.

2.1.4.3 Infrastruktur Pasar

Tabel 2.5 Infrastruktur Pasar

No	Nama Pasar	Komoditas	Kecamatan
1	Ayu	Warung makan, ekspedisi	Banjarsari
2	Bambu	Bambu	Banjarsari
3	Bangunharjo	Umum	Banjarsari
4	Elpabes	Elektronik, barang bekas	Banjarsari
5	Joglo	Umum	Banjarsari
6	Legi	Umum	Banjarsari
7	Mebel	Aneka Mebel	Banjarsari
8	Ngarsopuro	Elektronik	Banjarsari
9	Ngemplak	Umum	Banjarsari
10	Ngudi Rejeki Gilingan	Alat olahraga, sepeda, barang bekas	Banjarsari
11	Ngumbul	Umum	Banjarsari

12	Nongko	Umum	Banjarsari
13	Nusukan	Umum	Banjarsari
14	Taman pasar burung	Burung kicau, ikan hias	Banjarsai
15	Sidomulyo	Besi teknik, besi bangunan	Banjarsari
16	Triwindu	Barang antik	Banjarsari
17	Buah Jurug	Aneka buah	Jebres
18	Jebres	Umum	Jebres
19	Gede	Umum	Jebres
20	Ledoksari	Umum	Jebres
21	Mojosongo	Umum	Jebres
22	Pucangsawit	Umum	Jebres
23	Panggungrejo	Umum	Jebres
24	Rakyat Tanggul	Umum	Jebres
25	Rejosari	Umum	Jebres
26	Sibela Mojosongo	Umum	Jebres
27	Kembang	Aneka bunga dekorasi	Laweyan
28	Jongke	Umum	Laweyan
29	Kadipolo	Umum	Laweyan
30	Kabangan	Perabot RT, peralatan plastik	Laweyan

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2016

Jumlah infrastruktur pasar di Kota Surakarta yaitu 30 pasar dengan jenis pasar yang terbanyak yaitu pasar umum. Jumlah pasar terbanyak terdapat di

Kecamatan Banjarsari sedangkan paling sedikit yaitu Kecamatan Laweyan, serta Kecamatan yang tidak memiliki pasar yaitu Kecamatan Serengan dan Kecamatan PasarKliwon.

2.1.5 Kualitas dan Mobilitas Penduduk

2.1.5.1 Aspek Kesehatan

Indikator kesehatan penduduk terlihat dari aspek kelahiran dan kematian. Aspek kelahiran menyediakan data tentang angka kelahiran menurut umur, angka kelahiran total dan rasio anak perempuan. Sedang aspek kematian menyediakan data angka kematian bayi, angka kematian neonatal, angka kematian post neonatal, angka kematian anak, angka kematian balita dan angka kematian ibu.

2.1.5.1.1 Aspek Kelahiran

Jumlah kelahiran di Kota Surakarta pada tahun 2017 sebanyak 9.896 kelahiran hidup yang tersebar dalam lima kecamatan.

Tabel 2.6 Rasio Anak dan Perempuan di Kota Surakarta Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Anak 0-4 Tahun		Jumlah Perempuan 15-49 Tahun		Rasio Anak dan Perempuan
	N	%	N	%	
Laweyan	6.756	17,47	26.775	17,94	25,23
Serengan	3.524	9,11	14.128	9,47	24,94

Pasar Kliwon	6.270	16,21	21.997	14,74	28,5
Jebres	9.962	25,76	38.315	25,68	26
Banjarsari	12.159	31,44	48.011	32,17	25,33
Jumlah	38.671	100%	149.226	100%	25,91

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2017

Rasio anak dan perempuan merupakan perbandingan antara anak di bawah usia 5 (lima) tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15 - 49 tahun) di suatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan dapat digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama lima tahun yang lalu. Menurut data di atas pada tahun 2017 terdapat 38.671 anak kelompok usia 0-4 tahun di Kota Surakarta, sedangkan banyaknya perempuan pada kelompok usia 15-49 tahun sebanyak 149.226 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 25-26 balita.

2.1.5.1.2 Aspek Kematian

Tingkat kesehatan penduduk umumnya bisa dilihat dari besar kecilnya angka kematian, karena erat kaitannya dengan kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan membawa implikasi kebijakan peningkatan cakupan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, pencegahan dan penanganan penyakit menular serta pemahaman dan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat. Indikator kematian yang biasa digunakan adalah sebagai berikut:

a. Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Neonatal, Kematian Post Neonatal

Angka kematian bayi/Infant Mortality adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka ini digunakan sebagai indikator kemajuan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kualitas kehidupan bayi secara tidak langsung akan menjadi estimasi kualitas kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB.

Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/Neo Natal Death Rate) merupakan kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Sedangkan kematian *Post Neonatal* adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Tabel 2.7 Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi & Balita Tahun 2017

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lahir Hidup	4.911	4.985	9.896
2	Lahir Mati	8	4	12
3	Kematian Bayi	15	14	29
4	Bayi Neonatal	12	10	22
5	Kematian Post Neonatal	3	4	7
6	Kematian Anak Balita	10	3	13

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2017

Jumlah kelahiran hidup di Kota Surakarta Tahun 2017 sebanyak 9.896 bayi. Angka kematian bayi 2,93. Hal tersebut berarti diantara 1000 kelahiran hidup ada 2-3 bayi kurang dari 1 tahun meninggal, sedangkan angka neonatal sebesar 2,22. Artinya sebanyak 2-3 bayi yang meninggal sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran- hidup. Dilaporkan juga angka post neonatal sebesar 0,71, ini berarti bahwa sebanyak 0-1 bayi meninggal pada umur antara 1 bulan s/d kurang dari 1 tahun dari 1000 kelahiran hidup.

b. Kematian Anak

Jumlah anak usia 0-4 tahun pada pertengahan tahun 2017 di Kota Surakarta sebesar 38.655 sedang kematian anak balita ada 13 Kasus. Jadi angka kematian anak adalah 0,33 Artinya pada tahun 2017 dari 1000 anak usia 0-4 tahun ada 1 kasus kematian. Minimnya AKABA mengindikasikan peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan sangat baik, sehingga angka harapan hidup juga membaik.

c. Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*)

Penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu penting untuk dilakukan pemantauan. Hal tersebut disebabkan AKI merupakan salah satu indikator yang peka dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 2.8 Jumlah Kematian Ibu Hamil Tahun 2017

Uraian	<20 Tahun	20-35 Tahun	>35 Tahun	AKI
Kematian Ibu	0	5	2	70,74

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2017

Di Kota Surakarta terjadi kelahiran sebanyak 9.896 kelahiran hidup, dan terjadi 7 Orang Ibu meninggal karena persalinan dan pasca persalinan. Berdasarkan data angka kematian ibu/MMR sebesar 70,74 artinya ada 70-71 kasus kematian ibu dalam 100.000 peristiwa melahirkan.

2.1.5.2 Aspek Pendidikan

Indikator yang digunakan untuk mengetahui partisipasi sekolah dilihat dari angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni Angka Partisipasi Kasar/APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Murni/APM merupakan perbandingan penduduk usia yang seharusnya pada jenjang pendidikan tertentu yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan sesuai dibagi dengan jumlah penduduk berusia seharusnya pada jenjang tersebut.

Tabel 2.9 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Tahun 2017

No	Tingkatan	Laki-Laki +	Rasio
----	-----------	-------------	-------

		Perempuan				
		Jumlah	APK	APM	APK	APM
					P><L	P><L
I	Jenjang PAUD (TK/RA/TKLB)					
	1. Siswa PAUD (Semua siswa)	15.302	57,54	56,21	89,04	92,8
	2. Siswa PAUD (3-6 tahun)	14.949				
	3. Penduduk (3-6 tahun)	26.594				
II	Jenjang SD (SD/SDLB/MI)					
	1. Siswa SD (Semua siswa)	43.214	110,4	98,91	101,31	102
	2. Siswa SD (7-12 tahun)	38.725				
	3. Penduduk (7-12 tahun)	39.153				
III	Jenjang SMP (SMP/MTs/SMPLB)					
	1. Siswa SMP (Semua siswa)	24.782	87,93	81,25	98,03	90,8
	2. Siswa SMP (13-15 tahun)	22.901				
	3. Penduduk (13-15 tahun)	28.185				
IV	Jenjang SMA (SMA/SMALB/MA)					
	1. Siswa SMA (Semua siswa)	28.819	103,6	65,42	90,25	80,1
	2. Siswa SMA (16-18 tahun)	18.205				
	3. Penduduk (16-18 tahun)	27.830				
V	Jenjang Perguruan Tinggi					
	1. Mahasiswa (Semua mahasiswa)	26.026	41,97	37,73	76,06	68

2. Mahasiswa (19-24 tahun)	23.397				
3. Penduduk (19-24 tahun)	62.005				

Sumber : Angka Sementara Susenas 2017 (BPS Kota Surakarta)

Dari semua jenjang pendidikan dimulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi yang paling tinggi tingkat partisipasinya dari semua pelajar tanpa memandang usia, sehingga melebihi dari batas wajar usia pendidikan.

2.1.5.3 Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi akan membahas tentang proporsi dan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja, jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk usia 15-64 tahun yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif. Data ini berguna bagi pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan.

Tabel 2.10 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja per Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja (15-64 Thn)		Jumlah Penduduk		Persentase Tenaga Kerja
		N	%	n	%	%
1	Laweyan	70.092	17,86	100.861	17,92	69,49
2	Serengan	37.597	9,58	53.996	9,59	69,63
3	Jebres	101.333	25,82	144.241	25,63	70,25
4	Pasar Kliwon	58.394	14,88	84.729	15,05	68,92

5	Banjarsari	124.980	31,85	178.974	31,8	69,83
	Jumlah	392.396	100	562.801	100	69,72

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2017

Berdasarkan pada tabel jumlah dan proporsi tenaga kerja, dapat diketahui bahwa potensi produktif tenaga kerja rata-rata sebesar 69,72 persen. Jumlah tenaga kerja ini terbilang cukup besar dengan jumlah 392.396 jiwa, menjadi modal besar untuk melaksanakan pembangunan, namun demikian apabila tidak dikelola dengan baik justru akan menjadi permasalahan dan beban yaitu terjadinya pengangguran, kemiskinan, kesehatan, lingkungan dan sebagainya.

Tidak semua tenaga kerja merupakan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan (menganggur) atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.

Tabel 2.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta Tahun 2017

Kelo mpok umur	Jml tenag a kerja	Angkatan kerja			Jml bkn angkata n kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja
		Usia produkt if kerja	Usia produktif yg blm/sedang mencari kerja	Jml angkat an kerja		
1	2	3	4	5	6	7
15-19	43.988	969	2.449	3.418	40.570	7,77
20-24	41.520	10.849	1.960	12.809	28.711	30,85
25-29	39.477	25.123	1.973	27.096	12.380	68,64
30-34	42.786	34.240	1.485	35.725	7.061	83,5
35-39	47.526	38.522	1.002	39.524	8.002	83,16

40-44	42.11 8	33.339	663	34.002	8.116	80,73
45-49	40.33 9	31.127	610	31.737	8.602	78,68
50-54	37.13 2	28.650	500	29.150	7.982	78,5
55-59	32.23 5	24.352	499	24.851	7.384	77,09
60-64	25.27 5	17.498	579	18.077	7.198	71,52
Jumlah	392.3 96	244.66 9	11.720	256.38 9	136.007	65,34

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2017

Pada tahun 2017, sebesar 244.669 jiwa dari angkatan kerja sebesar 256.389 terserap di pasar kerja atau 95,43%. Sedangkan 4,57% belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Proporsi angkatan kerja yang bekerja tertinggi pada kelompok umur 30-34 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 969 jiwa sudah bekerja dan sebesar 2.449 belum/sedang mencari pekerjaan. Pada kelompok umur ini seharusnya mereka masih duduk bersekolah, tetapi terpaksa berhenti sekolah dan masuk pasar kerja. Pada kelompok ini diperlukan perhatian, agar tenaga kerjanya tidak berkualitas rendah yang pada gilirannya dapat berpengaruh pada penghasilan mereka yang rendah. Sementara itu angkatan kerja pra lansia (60-64 tahun) masih ada yang belum/mencari pekerjaan sebanyak 579 jiwa dan yang masih bekerja 17.498 jiwa. Hal tersebut memberikan tantangan dan kebijakan dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat untuk menampung pra lansia yang masih produktif.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja. APAK merupakan indikator untuk

mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif. Untuk APAK Kota Surakarta sebesar 65,34 artinya 65,34 % penduduk usia 15-64 tahun terlibat atau berusaha terlibat/mencari pekerjaan dalam kegiatan produktif. Semakin tinggi nilai APAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.

**Tabel 2.12 Jumlah Pencari Kerja dan Pencari Kerja Yang Ditempatkan
Tahun 2017**

Tingkat Pendidikan	Pencari kerja yang terdaftar			Pencari kerja yang ditempatkan		
	L	P	Jml	L	P	Jml
SD	12	6	18	0	3	3
SMP	37	28	65	10	13	23
SMA	388	314	702	175	273	448
DI/II	3	8	11	2	2	4
DIII	89	132	221	52	68	120
DIV/S1	219	251	470	33	23	56
S4	2	13	15	1	0	1
S3	0	0	0	0	0	0
Jml	750	752	1.502	273	382	655

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta Tahun 2017

Dari data di atas terlihat bahwa pencari kerja yang terdaftar 655 orang (43,61 %) yang ditempatkan atau memperoleh pekerjaan dari 1.502 jiwa, dan dari strata pendidikan pencari kerja dan yang ditempatkan terbanyak tingkat pendidikan SLTA/Sederajat. Sedangkan penduduk Kota Surakarta yang berjumlah 562.801 didominasi pekerjaan Karyawan Swasta, hal tersebut berarti warga Surakarta bekerja terbesar disektor swasta. Sedangkan kelompok yang kedua adalah pelajar dan mahasiswa, hal tersebut dapat dibuat kebijakan dan perencanaan di bidang pendidikan.

2.1.5.4 Aspek Sosial

Perubahan aspek sosial disamping ada faktor penyebab terjadinya perubahan sosial juga terdapat akibat/dampak dari perubahan sosial itu sendiri, baik dampak yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Dalam aspek sosial ini disajikan informasi kependudukan dilihat dari penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi penduduk penyandang cacat, proporsi penduduk miskin.

1. Proporsi Penduduk Penyandang Disabilitas

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meresmikan UU Penyandang Disabilitas pada 15 April 2016. Secara umum, aturan ini memuat dua hal besar, yaitu hak penyandang disabilitas dan kewajiban berbagai pihak untuk memenuhi hak tersebut. Undang-Undang ini berarti secara resmi penggunaan penyebutan “Penyandang Cacat” menjadi “Penyandang Disabilitas”. Perubahan

hal tersebut didasari agar lebih positif, pemberdayaan, kesetaraan, penghormatan harkat martabat manusia dan tidak mengandung kekerasan bahasa. Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan yang sama baik dalam pendidikan, pekerjaan bahkan hak politik.

Tabel 2.13 Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2017

No	Jenis Disabilitas	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		N	%	N	%	N	%
1	Fisik	167	27,65	108	26,09	275	27,01
2	Netra/Buta	57	9,44	46	11,11	103	10,12
3	Rungu/Wicara	99	16,39	95	22,95	194	19,06
4	Fisik/Mental	29	4,8	20	4,83	49	4,81
5	Mental/Jiwa	140	23,18	76	18,36	216	21,22
6	Lainnya	112	18,54	69	16,67	181	17,78
Jumlah		604	100	414	100	1.018	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2017

Dari jumlah penyandang disabilitas tahun 2017, jenis disabilitas fisik yang paling tinggi sebesar 27,01 sedangkan jenis disabilitas fisik/mental yang paling rendah sebesar 4,81. Jumlah keseluruhan penyandang disabilitas tahun 2017 berjumlah 1.018 orang.

Sedangkan Angka Penyandang Disabilitas Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14 Jumlah Penyandang Disabilitas Per Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Penyandang Disabilitas		Jumlah Penduduk		Angka Penyandang Disabilitas
		N	%	N	%	
1	Banjarsari	300	29,47	178.974	31,81	0,17
2	Serengan	83	81,15	53.996	9,6	0,15
3	Jebres	320	31,43	144.241	25,62	0,22
4	Pasarkliwon	151	14,83	84.729	15,05	0,18
5	Laweyan	164	16,12	100.861	17,92	0,16
Jumlah		1.018	100	562.801	100	0,18

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2017

Angka Penyandang Disabilitas menunjukkan banyaknya penduduk kota Surakarta yang menyandang disabilitas atau cacat. Informasi ini berguna untuk pengambilan kebijakan penyediaan akses atau fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan informasi/data pada tabel angka penyandang disabilitas diatas, terlihat bahwa banyaknya penduduk kota Surakarta yang menyandang disabilitas sebanyak 1,018 jiwa. Jumlah tersebut merupakan 0,18.% dari jumlah penduduk Kota Surakarta 562.801. Penyandang Disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Jebres sebanyak 320 jiwa atau 0,22% dari jumlah penduduk sebanyak 144.241, Kecamatan Laweyan terdapat penyandang disabilitas sebanyak 164 jiwa

atau 0,16 % dari jumlah penduduk sebanyak 100.861, untuk Kecamatan Serengan ada 83 jiwa atau 0,15 % dari jumlah penduduk 53.996. Pada Kecamatan Pasar Kliwon terdapat 151 jiwa atau 0,18 % dari jumlah penduduk 84.729, sedangkan di Kecamatan Banjarsari terdapat penyandang disabilitas 300 jiwa atau 0,17 % dari jumlah penduduk 178.974.

2. Proporsi Jumlah Penduduk Miskin

Salah satu dampak kemiskinan adalah menurunnya tingkat kesehatan. Untuk meringankan beban masyarakat miskin, pemerintah memberikan keringanan pembayaran iuran jaminan kesehatan/BPJS Kesehatan yang terbagi pembayarannya dalam APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota.

Tabel 2.15 Jumlah Keluarga Miskin dan PBI Yang Ditanggung APBD Kota Surakarta Tahun 2017

No	Kecamatan	Jml Keluarga Miskin	Jml Keluarga Rentan Resiko Sosial	Jml Penerima BPJS
1	Serengan	8.102	11.612	5.470
2	Jebres	23.529	26.286	14.381
3	Pasarkliwon	15.579	21.138	10.759
4	Banjarsari	30.474	35.392	13.402
5	Laweyan	12.414	17.500	6.766
	Jumlah	90.098	111.928	50.778

Sumber : Dinas Sosial Kota Surakarta, Tahun 2017

Total jumlah keluarga miskin di Kota Surakarta Tahun 2017 berjumlah 90.078 keluarga, dengan jumlah kecamatan yang tinggi terdapat di Kecamatan Banjarsari 30,474 keluarga, sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Serengan 8.102 keluarga. Total jumlah keluarga rentan resiko sosial 111.928 keluarga dengan jumlah kecamatan yang tinggi terdapat di Kecamatan Banjarsari 35.392 keluarga, sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Serengan 11.612 keluarga. Total jumlah penerima BPJS berjumlah 50.778 keluarga dengan jumlah kecamatan tertinggi terdapat di Kecamatan Jebres 14.381 keluarga, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Serengan 5.470 keluarga.

2.2 Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta

2.2.1 Kelembagaan Kota Layak Anak Kota Surakarta

Kelembagaan menyangkut tentang dasar yang membangun keberjalanan pengembangan serta landasan pokok yang menjadikan strategi pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Dengan melibat berbagai pertimbangan kelembagaan, Pemerintah Kota Surakarta dapat mengatur kemitraan dengan *Stakeholders* lainnya. Seperti peraturan Kota Layak Anak dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan.

2.2.1.1 Tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang Kota Layak Anak

- Perda No 4 Tahun 2012 Tanggal 1 Mei 2012 Tentang Perlindungan Anak Kota Surakarta.
- Perwali No 17 Tahun 2010 Tanggal 11 Juni 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan Layak Anak.

- Surat Keputusan Walikota Surakarta No 463.05/2.5/1/2017 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel Kota Surakarta.
- Perda No 4 Tahun 2010 Tanggal 15 April 2010 Tentang Pendidikan Kota Surakarta.
- Perwali No 2 Tahun 2 Tahun 2014 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta.
- Perwali No 21 Tahun 2009 Tentang Kartu Intensif Anak

2.2.1.2 Tersedia anggaran untuk melaksanakan kebijakan

Tabel 2.16 Indikator Anggaran Kebijakan KLA Tahun 2017

No	Indikator	Tahun 2017
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.	ADA
2	Anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.	ADA
3	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya.	ADA
4	Tersedia SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.	ADA
5	Tersedia data anak terpilah menurut jenjang usia.	ADA
6	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam	ADA

pemenuhan hak anak.

Sumber: Dinas PPPAPM Kota Surakarta tahun 2017

Anggaran kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surakarta sudah memenuhi semua dilihat dari beberapa indikator sehingga dalam melaksanakan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

2.2.2 Perkembangan KLA di Kota Surakarta

1. Tahun 2006 Kota Surakarta ditunjuk oleh KPP sebagai salah satu pilot proyek Pengembangan Model Kota Layak Anak bersama Gorontalo, Jambi, Sidoarjo, Kutai Kartanegara
2. Kota Surakarta Tahun 2006-2007 sebagai kota Pengembangan Model Kota Layak Anak
3. Program Tahun 2008-2017 Kota Surakarta menjadi Pengembangan Kota Layak Anak, Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak
4. Tahun 2019 diharapkan Kota Surakarta benar-benar menjadi kota yang layak untuk anak (Kota Layak Anak).

2.2.3 Tahapan KLA di Kota Surakarta

1. Komitmen Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Surakarta untuk aktif menyuarkan hak-hak anak serta mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak dalam Kota Layak Anak.
2. Komitmen *Stakeholders* (SKPD, LSM, Org. masyarakat, Perguruan Tinggi, Penegak Hukum, Sektor swasta, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Orang tua, Anak-anak).
3. Terbentuknya Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta (SK Walikota Surakarta No. 130.05/08/1/2008 ttg Tim Pelaksana PKLA Kota Surakarta).
4. MoU No. 463/108 Kesepakatan dalam Pengembangan KLA oleh Tim Pelaksana PKLA.
5. Rencana Aksi Kota Pengembangan Kota Layak Anak (Rak-Pkla) Kota Surakarta.

2.2.4 Klaster III KLA Kota Surakarta

2.2.4.1 Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 Tahun

Tabel 2.17 Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kelurahan UCI	Jumlah Balita	Jumlah Imunisasi Dasar Lengkap
1.	Pasar Kliwon	9	9	5.875	1.369
2.	Serengan	7	4	3.443	803
3.	Laweyan	11	10	6.786	1.633
4.	Banjarsari	13	13	12.407	2.912
5.	Jebres	11	10	10.887	2.413
Jumlah		51	43	39.380	9.130

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2017

Jumlah balita di Kota Surakarta Tahun 2017 yaitu 39.380 balita dengan jumlah yang tertinggi terdapat di Kecamatan Banjarsari 12.407 balita, sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Serengan 3.443. Jumlah imunisasi dasar lengkap di Kota Surakarta Tahun 2017 yaitu 9.130 balita dengan jumlah yang tertinggi terdapat di Kecamatan Banjarsari 2.912 balita sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Serengan 803 balita.

Tabel 2.18 Jumlah Ruang Laktasi

No	Instansi	Ruang Laktasi
1	Kantor Walikota	1
2	Kantor Kecamatan	5
3	Kelurahan	51
4	Puskesmas	17
5	Pasar Tradisional	7
6	PT KAI Solo Balapan	1
7	Mall	3
8	Terminal	1
9	Tempat Ibadah	5
Jumlah		91

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2017

2.2.4.2 Persentasi fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak

Tabel 2.19 Jumlah Tenaga Medis Puskesmas Ramah Anak Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas Ramah Anak	Jumlah Tenaga Medis		
			L	P	T
1	Serengan	1	0	3	3
2	Laweyan	1	1	2	3
3	PasarKliwon	1	0	3	3
4	Banjarsari	1	0	3	3

5	Jebres	1	0	3	3
Jumlah		5	1	14	15

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2017

Jumlah tenaga medis Puskesmas Ramah Anak tahun 2017 yaitu 15 tenaga medis, dengan hampir semuanya adalah perempuan. Jumlah Puskesmas Ramah Anak setiap kecamatan terdapat 1 puskesmas.

2.2.5 Klaster V Perlindungan Khusus

2.2.5.1 Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani

1. Tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban kekerasan.

- PERDA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

- PERDA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kota Surakarta.

- PERWALI No 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial.

- PERWALI No 3 Tahun 2007 tentang Komite Aksi Kota Surakarta, tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

2. Tersedia peraturan tentang penanganan anak korban penelantaran.

- PERDA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

3. Unit Kerja/Lembaga (Pemerintah dan atau masyarakat) yang memberikan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus : PPA Polresta, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, LBH Anak, LSM Sari, SPEKHAM, LSM ATMA, PT. PAS, PPT, Sahabat Kapas, PPAP Seroja, KPSA, Yayasan Talenta, Lehhamas Aisiyah, LPK Bina Bakat, Fatayat NU, Rumah Sakit Jiwa, Pusat Layanan Autis.

4. Mekanisme penanganan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan dengan melalui PPT dan jika belum dapat terselesaikan maka dilanjutkan ke Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan akan ditangani oleh PTPAS melalui SOP yang sudah dibuat.

5. Mekanisme pencatatan dan pelaporan tentang penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus: Untuk laporan yang ditangani oleh Bapermas PP PA dan KB, sedangkan untuk laporan yang ada di PPT dicatat oleh PPT yang menangani.

6. Sarana prasarana yang memadai bagi pelayanan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus : bekerja sama dengan lembaga – lembaga yang terkait dalam jaringan PTPAS, PLKSAI, PUSPAGA, Pusat layanan Autis.

7. Program/kegiatan pencegahan terhadap anak yang mengalami kekerasan, kejahatan seksual, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya melalui:

- 1) Penguatan kelembagaan yang digunakan sebagai acuan pencegahan terhadap anak yang mengalami kekerasan, kejahatan seksual, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
- 2) Sosialisasi kegiatan pencegahan dan pemenuhan hak hak anak
- 3) *Workshop* Pencegahan kekerasan Seksual untuk pendidik PAUD
- 4) Dialog Interaktif untuk keluarga ramah anak
- 5) Pelatihan Pelatihan Petugas PPT
- 6) KHA bagi tenaga kesehatan
- 7) KHA bagi tenaga pendidik
- 8) Sosialisasi pencegahan terhadap anak di sekolah

8 Mitra instansi yang melakukan pencegahan terhadap anak yang mengalami kekerasan, kejahatan seksual, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya :

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan melibatkan pemerhati anak
2. SKPD terkait

2.2.5.2 Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

Program pencegahan agar anak-anak tidak dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, yaitu :

- 1) Sosialisasi mengenai pencegahan anak-anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk di 5 kecamatan dan 51 kelurahan (aparatus + PPT + tokoh masyarakat).
- 2) Pendataan anak-anak pekerja di 5 kecamatan dan 51 kelurahan Pembentukan Komite Aksi Pencegahan Pekerjaan Terburuk Anak di Daerah berdasarkan Perwali.

Tabel 2.20 Jumlah anak yang terlibat di dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja Anak		
		L	P	T
1	Laweyan	2	0	2
2	Serengan	1	0	1
3	PasarKliwon	17	5	22
4	Jebres	6	0	6
5	Banjarsari	4	2	6

Sumber: Dinas PPPAPM Kota Surakarta Tahun 2017

Jumlah anak yang terlibat BPTA tahun 2017 yaitu 37 orang dengan yang tertinggi terdapat di Kecamatan Pasarkliwon 22 anak dan yang terendah terdapat di Kecamatan Serengan 1 anak.

Mekanisme penanganan anak yang bekerja :

- 1) Melibatkan perusahaan ataupun tempat yang digunakan untuk bekerja anak.
- 2) Dinsosnakertrans melakukan pendataan anak-anak yang dipekerjakan dalam BPTA
- 3) Pendekatan kepada orang tua maupun anak dan keluarga
- 4) Penarikan anak
- 5) Sosialisasi kepada masyarakat

2.2.5.3 Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani

Tabel 2.21 Lembaga Layanan Anak Terinfeksi HIV/AIDS Tahun 2017

Lembaga Layanan Anak Terinfeksi HIV/AIDS	Jenis Layanan	Jumlah Anak yang Dilayani		
		L	P	T
Rumah Lentera	Pengasuhan dan penjangkauan anak-anak dengan HIV/AIDS yang yatim piatu maupun ditinggalkan oleh orangtuanya	23	22	45

Sumber : Rumah Lentera

Jumlah anak yang dilayani diambil dari kasus anak terinfeksi HIV/AIDS yang terjadi di Kota Surakarta Tahun 2017.

2.2.5.4 Anak Korban Bencana dan Konflik yang Terlayani

Dalam melaksanakan pelayanan dalam penanggulangan bencana, terdapat beberapa program kegiatan yang didalamnya dapat mengakomodasi pelayanan penanggulangan bencana terhadap anak anak. Kegiatan tersebut diantaranya adalah :

1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tercapainya kecukupan sosialisasi tentang kebencanaan kepada masyarakat dimana sasaran kegiatan ini nantinya dapat melibatkan anak anak/pelajar sehingga pemahaman kebencanaan pada masyarakat semakin meningkat.

2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan kegiatan pengadaan logistik dan obat obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tercapainya kebutuhan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara. Dimana didalam setiap penduduk dalam penampungan sementara ketika bencana seringkali terdapat juga anak-anak yang juga harus dipenuhi pula kebutuhan logistik dan obat-obatan.

3. Program pengendalian banjir dengan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan pelatihan kebencanaan banjir terhadap masyarakat. Dimana setihap tahunnya selalu diadakan kegiatan pelatihan dasar air yang pesertanya didalamnya bisa melibatkan pelajar. Sehingga diharapkan

semakin banyak masyarakat dari usia muda yang sedikit banyak memiliki kemampuan dalam kesiagaan menghadapi bencana khususnya banjir dan nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana banjir.

2.2.5.5 Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi Yang Terlayani

Tabel 2.22 Lembaga Layanan Anak dengan Disabilitas

No.	Lembaga Layanan	Jenis Layanan
1.	Puskesmas	Pemeriksaan Kesehatan, Konsultasi, Terapi
2.	Rumah Sakit	Pemeriksaan Kesehatan, Konsultasi
3.	Klinik	Pemeriksaan Kesehatan, Konsultasi
4.	Pusat Layanan Autis	Terapi, Okupasi, Wicara, Psikologi, Fisioterapi

Sumber: Dinas PPPAPM Kota Surakarta Tahun 2017

Setiap lembaga layanan memiliki tugasnya masing-masing, sehingga anak dapat dilayani sesuai dengan kebutuhannya.

2.2.5.6 Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) Yang terselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi

- a. Anak usia di bawah 12 tahun : Tidak ada
- b. Anak usia 12 tahun hingga sebelum 14 tahun : Tidak ada

c. Anak di atas usia 14 tahun hingga sebelum 18 tahun

1) Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum : 13 anak

2) Putusan

- Diversi : 8 anak

- Anak Kembali ke Orangtua (AKOT) : 1 anak

- Anak Pidana Bersyarat (PiB) : 1 anak (Tidak masuk penjara)

- Anak dalam proses : 3 anak

Keterangan :

1 (satu) orang anak tidak bisa didiversi karena kasus narkoba.

Sumber Data: Balai Perumahan (BAPAS) Surakarta

2.2.5.7 Gambaran Kekerasan Pada Anak Di Surakarta

Tabel 2.23 Data Penanganan Kasus 2017

No.	Jenis Kasus	Anak
1.	Pemeriksaan/Persetubuhan	6
2.	Pencabulan	10
3.	Penganiayaan	2
4.	Perebutan Hak Asuh Anak	18
5.	<i>Trafficking</i> / Perdagangan	8
6.	Lain-lain	1
Jumlah Kasus		54

Sumber: UPT PTPAS Kota Surakarta Tahun 2017

Jumlah penanganan kasus tahun 2017 yaitu 54 kasus, dengan kasus yang tertinggi yaitu perebutan hak asuh anak berjumlah 18 anak, sedangkan yang terendah yaitu kasus lainnya berjumlah 1 anak.

Tabel 2.24 Data Penanganan Kasus Tahun 2018

No.	Jenis Kasus	Anak		
		P	L	Jumlah
1.	ABH (Pemeriksaan/Persetubuhan)	3	-	3
2.	ABH (Pencabulan)	3	-	3
3.	ABH (Narkoba)	-	1	1
4.	Pencabulan	2	5	7
5.	Penganiayaan	-	1	1
6.	KDRT	6	14	20
7.	Hak Asuh Anak	2	1	3
8.	<i>Trafficking/</i> Perdagangan	1	-	1
9.	<i>Bullying</i>	-	2	2
10.	Kekerasan Psikis dan Penelantaran	2	2	4
Jumlah Kasus Dalam Kota				45

Sumber: UPT PTPAS Kota Surakarta Tahun 2017

Jumlah penanganan kasus tahun 2018 yaitu 45 kasus, dengan kasus yang tertinggi yaitu KDRT berjumlah 20 anak, sedangkan yang terendah yaitu kasus narkoba, penganiayaan, perdagangan yaitu masing-masing 1 anak.

2.2.5.8 Anggaran Pelaksanaan Hak Perlindungan Khusus

Tabel 2.25 Anggaran kluster V : Hak Perlindungan Khusus Tahun 2017

No	Indikator	Tahun 2017
1	Persentase Anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	ADA
2	Proses Diversi yang diupayakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum / persentase penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif dan meningkat setiap tahun	ADA
3	Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak/ada, disosialisasikan dan diimplementasikan (jika terjadi bencana)	ADA
4	% Anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	ADA

Sumber: Dinas PPPAPM Kota Surakarta tahun 2017

Dalam menjalankan setiap kegiatan yang mendukung perlindungan khusus, Pemerintah Kota Surakarta telah berusaha memenuhi setiap indikator dengan alokasi anggaran yang memadai sehingga menunjang keberjalanan kegiatan.